

# **Implementasi Kebijakan Dalam Menyelesaikan Konflik (Studi Di Areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Sinar Mas Grup) Di Kabupaten Pelalawan**

*Panca Setyo Prihatin, M.Si & Syaprianto, M.Si*

## **ABSTRACT**

*This study aims to see the implementation of policies in resolving conflicts in the area of Industrial Plantation Forest Concession Rights of PT. Sinar Mas Group in Pelalawan District, the conflict must be quickly resolved so as not to cause greater problems, the seriousness of the government is needed. In this study researchers used the implementation theory according to Grindle and used qualitative analysis methods with the aim of describing, analyzing and attempting to elaborate policies and solutions in conflict resolution by interviewing directly and in depth the key informants who were considered most knowledgeable using purposive sampling technique. The findings of this study indicate that the implementation of policies in resolving conflicts in the area of Industrial Plantation Forest Concession Rights of PT. The Sinar Mas Group in Pelalawan District has not been implemented properly, so it is expected that the government will be more active in resolving the conflict, one of them is by revising the existing policy and the government must prioritize the principle of consensus by involving the company and community leaders around the company that.*

**Keywords : Policy Implementation, Conflict Resolution, Forests**

## **Pendahuluan**

Konflik penggunaan lahan yang terjadi di Kabupaten pelalawan memiliki karakteristik yang hampir sama dengan konflik penggunaan lahan yang terjadi di Riau pada umumnya. Konflik yang ditimbulkan ini memiliki daya rusak yang dapat menghambat pembangunan dan mengganggu keharmonisan dalam berhubungan dalam masyarakat. Misalnya konflik antara pengusaha Hutan Tanaman Industri dengan masyarakat terkait dengan status lahan yang memiliki dasar hukum yang

berbeda, begitupun antara masyarakat. Oleh karena itu adanya konflik ini perlu diketahui untuk mencari solusi dari persoalan yang bisa jadi esesnsinya bukan berasal dari penggunaan lahan.

Kebijakan kehutanan pada masa reformasi diawali dengan diterbitkannya Undang-undang Kehutanan No 41 Tahun 1999. Undang-undang ini merupakan aturan hukum yang menggantikan Undang-undang Pokok Kehutanan No 5 Tahun 1967. Dalam undang-undang No. 41 Tahun 1999, pemerintah pusat diberi

kewenangan untuk menentukan kawasan hutan. Dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa kawasan hutan di Indonesia dibagi menjadi dua yakni kawasan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang ditetapkan pemerintah pusat untuk dikelola oleh negara sedangkan hutan hak adalah wilayah hutan yang dapat dimiliki secara privat. Dalam penjelasan Undang-undang ini dinyatakan bahwa hutan yang merupakan hutan ulayat atau adat masuk dalam kategori hutan Negara.

Pada era reformasi semangat desentralisasi penyelenggaraan sektor kehutanan kembali coba dilakukan. Pasal 66 Undang-undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan kehutanan pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah. Kehadiran Hutan Tanaman Industri khususnya di Kabupaten Pelalawan menyisakan banyak persoalan antara pihak perusahaan dan masyarakat sekitar yang telah melahirkan konflik berkepanjangan. Di satu sisi Hutan Tanaman Industri memberikan implikasi positif bagi kemajuan daerah namun disisi yang lain memiliki dampak negatif dalam program keberdayaan masyarakat

seputar wilayah Hutan Tanaman Industri.

Konflik dalam penggunaan lahan timbul karena adanya perbedaan persepsi antara beberapa pihak dalam penggunaan lahan. Perbedaan persepsi yang dimaksud dalam konflik ini dimanifestasikan dalam wujud dasar bertindak dari tiap pihak dalam melakukan penggunaan lahan. Konflik penggunaan lahan di Propinsi Riau merupakan permasalahan yang hampir terjadi di seluruh wilayah dan konflik ini merupakan permasalahan besar yang sulit untuk diselesaikan. Dampak dari adanya konflik penggunaan lahan yang tidak selesai sampai saat ini adalah tidak tuntasnya pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Riau. Hal ini disebabkan tidak ditemukannya titik temu dalam penyelesaian status lahan. Konflik yang terjadi dalam penggunaan lahan memiliki banyak dimensi, baik hukum, sosial ekonomi dan politik. Sehingga untuk menyelesaikan konflik tersebut perlu dilakukan pendekatan dari aspek-aspek tersebut sehingga penyelesaian konflik sampai ke akar permasalahan konflik. Dalam penyelesaian konflik ini juga diperlukan informasi mengenai cara penyelesaian yang tepat untuk tiap kasus

yang berbeda, apakah pendekatan hukum, sosial atau politik yang digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian konflik.

Di Kabupaten Pelalawan sendiri, akibat kebijakan pengelolaan hutan tersebut telah menimbulkan konflik yang sampai saat ini terus berlanjut. Konflik penggunaan lahan antara masyarakat dengan perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan tanaman industri di Riau umumnya dan di Kabupaten Pelalawan khususnya bermula sejak di keluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1986 di Provinsi Riau, yang telah ditetapkan sebagai kawasan Hutan Produksi Tetap.

Berdasarkan data jumlah konflik sosial areal lahan khususnya hutan di Kabupaten Pelalawan dari tahun 2012-2014 mengalami peningkatan yaitu untuk tahun 2012 terjadi dua kali konflik areal lahan kehutanan antara masyarakat dengan perusahaan, tahun 2013 meningkat menjadi 5 kali berbanding 3 kali konflik lahan pada sektor perkebunan dan terjadi peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2014 yaitu sebanyak 10 kali konflik sektor kehutanan. Luas areal konflik yang terjadi di kabupaten Pelalawan juga

mengalami peningkatan yaitu untuk tahun 2012 sebesar 300 Ha, dan meningkat menjadi 42.021 Ha pada tahun 2013 serta menurun menjadi 39.550 Ha areal konflik sektor kehutanan antara masyarakat dengan perusahaan yang beroperasi di bidang pengelolaan hutan.

Sebagai realitas sosial, konflik memiliki dua sisi yaitu nilai positif dan negatif, dari sisi positif konflik memiliki peran penting untuk membentuk perubahan sosial yang lebih matang di masyarakat, membangun dinamika, penguatan soliditas atau bentuk pola integrasi yang baru di tingkat masyarakat. Namun di sisi negatif, konflik dapat menimbulkan kerawanan sosial di masyarakat, disintegrasi, krisis, kekacauan maupun disharmoni jangka pendek dan panjang.

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana Implementasi kebijakan dalam menyelesaikan konflik di areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Sinar Mas Grup Kabupaten Pelalawan?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan

deskriptif yang bertujuan menganalisis hasil temuan dilapangan berdasarkan konsep atau teori yang faktual dan disesuaikan dengan persoalan yang diteliti untuk menemukan solusi berupa jawaban dan gambaran secara lengkap. Serta mengungkap berbagai persoalan dalam menyelesaikan konflik di di areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT.Sinar Mas Grup di Kabupaten Pelalawan.

Sumber Data berasal dari informan dan dokumen, teknik pengumpulan data data yakni: observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan keabsahan data menggunakan pendekatan linier dan hierarkhis yang dibangun dari bawah keatas. Komponen analisis data linier dan hierarkhis, yaitu: memvalidasi kekurangan informasi, data mentah (transkrip, data lapangan, gambar,dsb). Mengelolah dan mempersiapkan data untuk dianalisi, membca keseluruhan data, encoding data, tema-tema, deskripsi, menghubungkan tema-tema/ deskripsi-deskripsi( seperti, grounded theory, studi kasus) menginterpretasikan tema-tema/ deskripsi-deskripsi.

## **Hasil Dan Pembahasan**

Hasil penelitian Implementasi kebijakan dalam menyelesaikan konflik (Studi di areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Sinar Mas Grup) di Kabupaten Pelalawan, dapat dikemukakan sebagai berikut:

### **a. Interests Affected**

Yang dimaksudkan dengan Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan dari mereka yang dipengaruhi atau terkena suatu implementasi kebijakan, yaitu mereka yang menjadi sasaran suatu kebijakan. Dasar pemikirannya adalah bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti akan berkaitan dengan banyak kepentingan. Sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut berkaitan dengan implementasi kebijakan. Hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dimensi Interest affected Implementasi kebijakan dalam menyelesaikan konflik di areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di kabupaten pelalawan dapat dijelaskan yaitu, Implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan bersifat top-down, dengan asumsi tanpa memperhatikan aspirasi dari masyarakat sebagai target group dari kebijakan tersebut.

Kebijakan yang dibuat harus mampu mengakomodir kepentingan/kebutuhan kelompok sasaran, baik secara kelembagaan/ kelompok-kelompok yang tergabung dalam organisasi maupun kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan kepentingan individu-individu.

Target group dari kebijakan dalam menyelesaikan konflik di areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Pelalawan, berdasarkan ketentuan umum yang terdapat dalam undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial

Implementasi kebijakan dalam menyelesaikan konflik di areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Sinar Mas Grup di Kabupaten Pelalawan ini dalam prosesnya mendapatkan beberapa permasalahan yang diantaranya rendahnya kesadaran masyarakat akan aturan, kurang memadai kualitas sumber daya manusia dari pemerintah dalam penyelesaian konflik dan kurangnya aturan yang mendukung penyelesaian konflik disektor kehutanan. Persoalan tersebut dikemukakan oleh salah seorang pemuka masyarakat :

"Banyak hutan dan lahan yang di desa kami diserobot oleh perusahaan sehingga kami tak bisa berbuat banyak karena banyak dari masyarakat yang tidak paham aturan disamping itu kurangnya serius pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini.

Selain persoalan penyerobotan lahan hutan, persoalan lainnya yang ditemukan dilapangan adalah tumpang tindih kepemilikan tanah dan tidak jelasnya batas- batas kepemilikan tanah sehingga penyelesaian konflik disektor kehutanan semakin sulit untuk diselesaikan.

Kepentingan individu tidak hanya untuk memaksimalkan mereka sendiri atau kepentingan pribadi. Ini tidak berarti bahwa mereka bertindak 'egois'; kepentingan dirinya sendiri juga termasuk, kesejahteraan keluarga dan teman. Memaksimalkan kesejahteraan sendiri merangsang orang untuk menjadi sangat akal, kreatif, cerdas dan produktif dan akhirnya menaikkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Indikator kepentingan masyarakat menjadi perhatian disebabkan karena indikator ini adalah indikator dengan jumlah tanggapan yang paling tinggi dari responden, sehingga

dapat diasumsikan dari tanggapan responden terhadap indikator kepentingan masyarakat, bahwa masyarakat sudah merasakan manfaat yang besar dari Implementasi kebijakan dalam menyelesaikan konflik di areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Pelalawan. Indikator kepentingan masyarakat ini dapat dijelaskan dalam kepentingan secara personal, masyarakat peserta program dan masyarakat secara umum.

Pemerintah selaku pelaksana membentuk kelompok masyarakat untuk mewadahi dan sebagai institusi yang akan mengikat masyarakat sehingga akan memudahkan dalam transfer pengetahuan antar sesama masyarakat sebagai peserta program juga akan memudahkan dalam proses pengawasan kebijakan.

Dan berdasarkan hasil observasi lapangan kebijakan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat secara keseluruhan pada kenyataannya belum bisa dipenuhi. Hal tersebut terjadi, karena beberapa alasan: pertama, keterbatasan pengetahuan menyebabkan masyarakat kurang memahami kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. tidak sesuai "guidelines" yang telah ditetapkan; kedua, optimalisasi peran

pemerintah dalam melaksanakan kebijakan belum sepenuhnya terjadi.

#### **b. Type of benefits**

Dimensi Type of benefits dikembangkan untuk menjangkau informasi apakah dengan implementasi kebijakan dalam menyelesaikan konflik di sektor kehutanan manfaatnya akan meningkatkan perekonomian masyarakat miskin, kebutuhan keluarga terpenuhi, dan kesempatan berusaha terbuka luas serta mempunyai manfaat bagi pembuat kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hutan taman industri seharusnya mempunyai tingkat kemanfaatan lebih besar kepada sasaran dari kebijakan dibandingkan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Bentuk manfaat dari kebijakan seharusnya sudah menjadi tugas dari pemerintah memberikan pemahaman kepada target group hal ini dilakukan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan suatu kebijakan. Adanya respon ketidaktahuan akan guna suatu kebijakan akan menyebabkan sulitnya faktor komunikasi dalam proses pembinaan kebijakan kedepan. Hal ini ditemukan adanya tanggapan dari masyarakat seperti:

“Kami ndak tahu apa saja kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait Hutan Taman Industri.namun yang pasti kami yang berada disini tidak merasakan manfaat apa- apa karena kami tidak lagi bisa dengan bebas mencari kayu dan pendapatan kami menjadi berkurang karena kami menggantungkan hidup kami di hutan.

Secara garis besar Implementasi kebijakan dalam menyelesaikan konflik di Kabupaten Pelalawan belum berjalan lancar dan ada banyak kendala. Seperti diungkapkan oleh Kepala Dinas kehutanan Kabupaten Kabupaten:

“Bahwa selama ini pemerintah sangat komit untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada disekitar hutan taman industri namun ada beberapa kendala seperti kurangnya perhatian perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya hal ini bisa dilihat dari perekonomian masyarakat tidak mengalami perubahan sejak adanya hutan taman industri sehingga sering terjadi konflik dilapangan.

Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus mampu memberi manfaat pada masyarakat yang tinggal disekitar hutan ,sehingga manfaatnya dapat dirasakan bukan saja pada kebijakan itu diimplementasikan, tetapi

jauh ke depan mampu mengantar masyarakat target group menjadi mandiri dan memiliki kemampuan ekonomi lebih, serta menebarka kepada masyarakat lainnya. Bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata yang ditimbulkan. Output kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya, pembangunan dan rehabilitasi jalan raya, pembayaran tunjangan kesejahteraan atau tunjangan profesi, penangkapan terhadap pelaku tindak kriminal, atau penyelenggaraan sekolah umum. untuk menentukan outcome kebijakan publik perlu diperhatikan perubahan yang terjadi dalam lingkungan atau sistem politik yang disebabkan oleh aksi politik.

Oleh karena itu kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak sekedar tergantung pada kemampuan pelaksana kebijakan, tetapi juga harus ditopang oleh keikutsertaan kelompok sasaran secara keseluruhan, sehingga manfaat kebijakan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran, baik secara individu, anggota keluarganya, maupun masyarakat secara keseluruhan. Keberadaan kelompok sasaran dalam konteks implementasi kebijakan

diperhadapkan pada adanya keterbatasan aspek Sumber Daya Manusia (SDM), oleh karena itu upaya untuk membentuk dan merubah cakrawala berfikir dan berperilaku mereka senantiasa dilakukan, sehingga pada suatu waktu akan timbul kemandirian mereka.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan sebagai counter information dapat disimpulkan bahwa perekonomian masyarakat disekitar hutan taman industri tidak bertambah meskipun mereka berada disekitar perusahaan tersebut sehingga kebijakan sektor kehutanan belum terlaksana seperti yang diharapkan. Belum maksimalnya implementor dalam melakukan tahapan-tahapan kebijakan merupakan kunci masalah diatas, sehingga implementasi kebijakan sektor kehutanan tidak membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik bahkan justru sebaliknya karena hutan adalah sumber kehidupan mereka. Berdasarkan pengamatan di lapangan, Belum adanya integrasi yang maksimal antara masyarakat, pemerintah dan pihak swasta dalam menjalankan program kebijakan ini menyebabkan belum terselesaikannya persoalan-persoalan diatas secara terintegrasi dan maksimal.

### c. Extent of change envisioned

Dimensi Extent of change envisioned yang meliputi indikator perbaikan status sosial, peningkatan taraf hidup, dan peningkatan kemampuan ekonomi dari masyarakat miskin. Dari hasil penelitian responden menilai positif, artinya implementasi kebijakan sektor kehutanan dapat membawa perubahan yang diinginkan khususnya pada masyarakat miskin sehingga berdampak pada efektivitas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pelalawan provinsi Riau. Dalam perspektif responden sebagai implementator kebijakan sektor kehutanan.

Hasil wawancara dengan dijelaskan bahwa:

“Masyarakat berharap bahwa kebijakan yang telah ada itu dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. Namun apa yang sudah rencanakan belum konsisten dilaksanakan. Itu saja masalahnya, Di sisi kebijakan sudah melaksanakan fungsinya dengan harapan keberadaan hutan tanaman industri ini bisa bermanfaat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat miskin. Sangat disesalkan jika keberadaan

perusahaan disekitar masyarakat tidak dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar.

Kemiskinan yang dihadapi masyarakat dapat dikategorikan atas tiga kategori yaitu, pertama kemiskinan yang berhubungan dengan budaya (culture) yang hidup di masyarakat, yang biasa disebut dengan kemiskinan kultural. Dalam hal ini kemiskinan dikaitkan dengan etos kerja. Kedua, bahwa kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dalam pemilihan faktor produksi di masyarakat. Masyarakat yang memiliki akses produksi cenderung mendominasi dan melakukan ekspansi ekonomi yang akhirnya menyisihkan masyarakat kecil, akibatnya muncul kemiskinan struktural karena lemahnya kemampuan usaha dan terbatasnya akses pada kegiatan ekonomi. Ketiga, kemiskinan yang disebabkan kekurangberuntungan seperti, fisik yang lemah, kerentaan, terisolasi dan ketidakberdayaan.

Mengacu pada pendapat Grindle (1980:8) bahwa semakin derajat perubahan dapat dirasakan langsung dan cepat oleh target group, maka implementasi kebijakan dianggap semakin efektif, maka derajat perubahan yang harus dirasakan dampaknya secara langsung saat implementasi kebijakan

sektor kehutanan dilaksanakan di Kabupaten Pelalawan adalah perubahan status sosial, Sebelum adanya perusahaan disekitar masyarakat, kehidupan masyarakat yang tergantung dari hutan, serta pencarian madu hutan, dan menjadi buruh kayu di tempat pengolahan kayu gelondongan (sawmill).

Berdasarkan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat pendapatan yang rendah menjadikan para masyarakat hanya terfokus untuk berupaya keras memenuhi kebutuhan primer, seperti makan atau pakaian. Pemenuhan kebutuhan sekunder atau tertier dari masyarakat miskin di Kabupaten Pelalawan hanya terjadi pada saat dapat rezeki berlebih seperti hasil tangkapan ikan melimpah atau musim madu, istilah masyarakat tempatan adalah “rezeki harimau”. Selain rendahnya status sosial dan kemampuan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat juga mempersempit cakrawala mereka terhadap lapangan pekerjaan lainnya.

Pemerintah diharapkan dapat mengubah pola pikir, sikap dan tingkah laku masyarakat. Interaksi yang intens antar masyarakat akan menghasilkan suatu kesepakatan antar masyarakat

dalam mengelola kebijakan di lokasi pelaksanaan, dan pada akhirnya akan membuat kesadaran masyarakat akan pentingnya peningkatan ekonomi secara lebih terarah dan jelas, baik dari perencanaan ekonomi keluarga maupun peningkatan taraf hidup masyarakat kedepannya

Perubahan status sosial, taraf hidup, dan daya beli ini juga harus disikapi dan dicermati oleh pemerintah untuk tidak menciptakan masyarakat konsumtif di pedesaan. Karena peningkatan tersebut dapat menciptakan shock culture di masyarakat yang berakibat akan hilangnya nilai-nilai kearifan lokal yang berguna dalam kesinambungan Implementasi kebijakan dalam menyelesaikan konflik areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Pelalawan.

#### **d. Site of decision making**

Masih terdapat tumpang tindihnya dalam pengambilan keputusan yang strategis terhadap kelangsungan kebijakan tersebut di masyarakat, merupakan persoalan yang ditemukan dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan.

Menurut pendapat Grindle (1980:6) yang dimaksud dengan letak pengambilan keputusan adalah dimana

dan siapa yang berhak dan berwenang mengambil keputusan untuk melaksanakan kebijakan. Keberagaman dan letak geografis menentukan keberhasilan sebuah program. Semakin homogen dan dekat letak geografis pengambilan keputusan ke lokasi dimana kebijakan tersebut diimplementasikan, maka semakin tinggi kemungkinan keberhasilan kebijakan itu. Demikian pula sebaliknya, semakin beragam atau jauh letak pengambilan keputusan, maka semakin lemah kemungkinan berhasilnya suatu kebijakan mencapai tujuannya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada beberapa anggota masyarakat, ditemukan beberapa informasi: pertama, masyarakat pernah diajak musyawarah oleh pemerintah setempat yaitu gabungan dari pemerintah daerah kabupaten, pemerintah kecamatan dan desa untuk membicarakan rencana pemerintah daerah menjadikan desa mereka menjadi kawasan kebijakan tersebut, kedua, keterbelakangan dan ketertinggalan baik dari akses dan informasi, membuat pemilihan lokasi kebijakan di desa tersebut dianggap layak untuk dijadikan lokasi kebijakan sektor kehutanan ketiga, karakteristik masyarakat yang homogen

memudahkan bagi pemerintah daerah untuk masuk dalam lingkungan masyarakat di desa tempat lokasi kebijakan dilaksanakan.

Disamping itu Etos kerja dan semangat dari implementor seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam mengelola kebijakan, bila para implementor tidak gigih dalam membina etos kerja masyarakat dikhawatirkan, perubahan pola pikir dan hasil kebijakan juga akan terhambat. Kendala jarak, sarana dalam melakukan proses tersebut bukan menjadi halangan bagi pihak implementor dalam melaksanakan tugas tersebut, karena dengan penjadwalan kunjungan baik ke pihak kecamatan, desa akan memompa semangat masyarakat untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh.

#### **e. Program Implementors**

Implementator kebijakan dituntut memiliki kemampuan manajerial, kemampuan teknik, telah melakukan pembagian tugas sesuai peran masing-masing, dan bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan sektor kehutanan. "Implementation is that set of activities directed toward putting out a program into effect" (Grindle 1980:26)

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-

tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Maksudnya, program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget. Pikiran yang sama dikemukakan oleh Siagian, program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sasaran yang dikehendaki ,
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu,
3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya,
4. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan dan
5. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan (Siagian, 1985:85).

Masyarakat sebagai target group dalam proses implementasi kebijakan sektor kehutanan di kabupaten Pelalawan. Dalam posisi sebagai objek kebijakan diharapkan masyarakat juga berperan sebagai subjek yang juga

menentukan terlaksananya kebijakan dengan sukses.

Sebagai objek kebijakan, masyarakat desa juga berperan dalam mengontrol dan mengevaluasi terlaksananya kebijakan, contoh yang bisa dilakukan adalah kontroling bagi masyarakat disekitar Hutan Tanaman Industri, atau mengevaluasi tentang kinerja tenaga pendamping dalam proses pelaksanaan kebijakan.

Implementator kebijakan memegang peranan penting dalam menyukseskan keberhasilan implementasi kebijakan. Sejumlah keterampilan manajerial tersebut diharapkan mampu mendukung implementator kebijakan mewujudkan tujuan kebijakan sektor kehutanan, karena berhadapan langsung atau selalu berinteraksi dengan kelompok sasaran yang memiliki berbagai keterbatasan pola pikir, sikap dan perilaku, ada yang mendukung dan ada pula yang menolak kebijakan tersebut.

Implementor kebijakan agar dapat mengimplementasikan kebijakan dengan baik dipengaruhi oleh hal-hal berikut:

1. Kepemimpinan.
2. Komitmen.
3. Perencanaan.

4. Dukungan finansial.
5. Dukungan staff yang profesional.
6. Koordinasi.
7. Sinkronisasi.
8. Sistem dan prosedur.
9. Ketepatan waktu.
10. Bebas pengaruh.

Hal penting lainnya agar kebijakan dapat dipersepsikan dan diimplementasikan dengan baik oleh implementor, adalah adanya interaksi antara pihak yang merumuskan kebijakan dengan pihak yang mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pihak yang merumuskan kebijakan membutuhkan data dan informasi yang akurat yang akan digunakan untuk mendesain kebijakan, akan tetapi mereka tidak memiliki infrastruktur yang baik untuk mendapatkan data dan informasi tersebut. Ketersediaan data dan informasi akan dapat dipenuhi dengan baik oleh implementor karena mereka memiliki infrastruktur yang memadai untuk dapat mencari data, mengolahnya dan menjadikannya informasi yang berguna bagi para perumus kebijakan. Di pihak lain, menterjemahkan suatu kebijakan menjadi program-program dan

aktivitas-aktivitas yang spesifik oleh implementor tidak akan efektif jika tidak melakukan interaksi berupa komunikasi dengan para perumus kebijakan.

Kebijakan sektor kehutanan seharusnya dilaksanakan oleh masyarakat yang tergabung dalam masyarakat dengan memosisikan masyarakat sebagai objek dan juga sekaligus sebagai subjek kebijakan. Dalam peran masyarakat sebagai subjek, selayaknya masyarakat miskin di desa tidak hanya berperan dalam menentukan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan sektor publik.

Sebagai bahan konfirmasi antara data hasil analisis uji statistik, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa ketua kelompok dan anggota kelompok nelayan di lokasi. Hasil wawancara terungkap hal-hal sebagai berikut: pertama, Pihak pelaksana kebijakan yang belum jelas Tupoksi dalam mendampingi pelaksanaan kebijakan diakibatkan pelaksana utama pembangunan adalah pihak ketiga; kedua, belum jelasnya peran dari pihak kecamatan dan desa sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat miskin dalam kebijakan sektor kehutanan. ketiga, keterbatasan SDM di tingkat kecamatan dan desa dalam

bidang dalam bidang kehutanan, sehingga menyulitkan masyarakat meminta pendapat atau berkoordinasi dengan pihak pelaksana

Peran implementator kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam implementasi kebijakan sektor kehutanan harus dilakukan secara terintegrasi, dengan melibatkan pihak lain atau lembaga lain. Keterlibatan pihak lain ini akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di pihak implementator dalam menjalankan imlementasi sehingga lebih maksimal dalam penerapannya. Pihak lain yang dimungkinkan terlibat dalam proses implementasi kebijakan ini adalah Perguruan Tinggi, Balai Penyuluhan Tanaman, atau LSM (NGO) yang bergerak di sektor kehutanan .

Dari hasil pengamatan di lokasi penelitian dampak Hutan Tanaman Industri, yaitu:

#### 1. Dampak Ekologi

Dampak dari segi ekologi yang ditimbulkan Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah:

- a. Menurunkan kualitas tanah
- b. Tanaman disukai hama
- c. Merusak ekosistem hutan

## 2. Dampak Sosial

Dampak sosial yang akan ditimbulkan dari pembangunan HTI yaitu:

- Terjadi kesenjangan sosial dalam masyarakat setempat dengan pengusaha HTI
- Bisa menimbulkan konflik perebutan lahan, apabila pengusaha HTI menggunakan lahan rakyat
- HTI yang dibangun pada lahan rakyat akan membuat masyarakat merasa tidak aman dan tidak nyaman.

Adapun Manfaat Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI):

1. Memberikan / membuka lapangan kerja baru, sehingga kebutuhan tenaga kerja meningkat.
2. Memberdayakan masyarakat sekitar, sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.
3. Dengan adanya HTI akan memenuhi kebutuhan produksi industri dalam negeri, seperti meubel, kayu lapis, kertas dsb.

Selanjutnya suatu kebijakan tidak akan mendapat dukungan jika kebijakan

tersebut tidak memberikan keuntungan kepada mereka. Disamping itu karakteristik para agen implementor dapat mempengaruhi disposisi mereka. Sifat jaringan komunikasi, derajat control secara berjenjang dan tipe kepemimpinan dapat mempengaruhi identifikasi individual terhadap tujuan dan sasaran organisasi, dalam nama implementasi kebijakan yang efektif sangat tergantung kepada orientasi dari para agen/ kantor implementator kebijakan.

Proses implementasi kebijakan sektor kehutanan melibatkan berbagai pihak di berbagai sektor, dan melakukan kerjasama antar instansi baik secara horizontal ataupun vertikal. Pemahaman atas tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam kebijakan sebagai pelaksana kebijakan sangat di perlukan dan penting.

Prinsip kerja dan prosedur yang dimiliki masing-masing instansi dalam mengelola kebijakan sektor kehutanan memerlukan koordinasi untuk membangun kesepahaman atas peran yang terkait dalam proses implementasi kebijakan sektor kehutanan, peran fungsi koordinasi antar instansi yang terlibat dalam kebijakan ini menjadi penting

untuk efektifitas dan meminimalkan kendala dalam Implementasi kebijakan dalam menyelesaikan konflik di areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau.

#### **f. Resources Committed**

Ketersediaan berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk menunjang implementasikan kebijakan mutlak diperlukan. Ketersediaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sektor kehutanan membuat program kebijakan menjadi tepat waktu, tepat sasaran dan tepat pelaksanaan. Ketersediaan aparat/pegawai yang dikhususkan untuk mengelola kebijakan ini diharapkan mampu membina masyarakat di sekita Hutan Tanaman Industri.

Tanggapan responden terhadap hal ini adalah:

“pegawai yang ditugaskan pada kegiatan ini tak paham tentang kebijakan sektor kehutanan, mereka membaca buku, kalau tidak kami dibaginya buku, terus kami disuruhnya membaca, mana kami mengerti pak, kami tau berladang, tak mengerti kami do pak, sudah tu, kadang dalam sebulan tu belum tentu

pulak mereka datang nengok (melihat) kami.

Selanjutnya Grindle (1980: 3) mengemukakan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai faktor antara lain: resources, intergovernmental relations, commitment bureaucracy, and reporting mechanisms. Resources dalam perspektif Grindle sebelum kebijakan itu dibuat seharusnya sudah dirancang anggaran biayanya. Anggaran biaya menentukan keberhasilan kebijakan, jika tidak direncanakan dengan baik maka kemungkinan besar kebijakan itu akan mengalami kegagalan. Demikian pula intergovernmental relations, bahwa implementasi kebijakan akan terlaksana jika tercipta hubungan antar pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah. Selanjutnya faktor berikut adalah commitment bureaucracy. Komitmen birokrasi adalah kesediaan para pelaksana kebijakan untuk sungguh-sungguh mewujudkan produk kebijakan yang ditujukan kepada kelompok sasaran yang merupakan tugas pokok dan fungsi instansi/ dinas dimana mereka bekerja. Oleh karena itu kunci keberhasilan implementasi kebijakan salah satunya tergantung pada komitmen birokrasi tersebut.

Hubungan antar sumber daya (resource) dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam batas wilayah organisasi tertentu dapat dikemukakan bahwa tersedianya dana dan sumber lain dapat menimbulkan tuntutan dari warga masyarakat swasta, kelompok kepentingan yang terorganisir untuk ikut berperan dalam melaksanakan dan menyukseskan suatu kebijakan. Jelasnya prospek keuntungan pada suatu program kebijakan dapat menyebabkan kelompok lain untuk berperan serta secara maksimal dalam melaksanakan dan menyukseskan suatu program kebijakan.

Meter dan Horn (1975: 462) menyatakan: "Sebelum suatu kebijakan diimplementasikan ditentukan terlebih dahulu standar dan sasaran program secara tertulis, sehingga para implementator melakukan aktivitasnya mengacu pada standar yang ada, dan hasil pekerjaan yang dilakukan tidak menyimpang dari sasaran". Selanjutnya, jika standar dan sasaran kebijakan telah dirumuskan dengan baik, tetapi tidak ditunjang dengan sumber daya yang memadai seperti tersedianya dana, para pelaksana yang terlatih dan terampil bekerja mustahil implementasi kebijakan akan sesuai standar dan mencapai sasaran kebijakan.

Barnes (2003: 56) mengemukakan bahwa:

1) Kepuasan masyarakat memberikan keuntungan yang lebih besar dan memungkinkan menjadi pelanggan dalam jangka panjang dan mengarah pada pengembangan hubungan; dan (2) Kepuasan masyarakat dapat dicapai dengan memusatkan perhatian pada pemuasan kebutuhan publik pada tingkat yang lebih tinggi.

Kebijakan sektor kehutanan yang dilaksanakan memerlukan dukungan pembiayaan yang sangat besar dari pemerintah karena dilaksanakan secara "top-down" dengan keharusan untuk memperhatikan aspirasi masyarakat kearifan lokal.

Sumberdaya dalam menjalankan aktivitas implementasi kebijakan dalam menyelesaikan konflik harus dipersiapkan secara maksimal. Pendanaan yang optimal, aparat yang amanah dan kredibel, partisipasi aktif masyarakat, petunjuk yang jelas merupakan sumber daya yang diperlukan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan di masyarakat. Sumberdaya finansial, sumberdaya informasi, sumberdaya alam, sumberdaya sosial, sumberdaya fisik, merupakan jenis-jenis

sumber daya yang terdapat dalam proses implementasi suatu kebijakan. Jenis sumberdaya terdiri dari tangible dan intangible. Sumberdaya finansial merupakan salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan dalam menyelesaikan konflik di Kabupaten Pelalawan. Ketidakmampuan dalam mengelola sumberdaya finansial ini akan memberikan dampak terhadap penurunan kualitas atau membuat perubahan perilaku sosial yang negatif dan akan menghambat efektivitas untuk masyarakat di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Sumber daya finansial bukan hanya dalam bentuk jumlah nilai finansial yang dimiliki atau diperlukan oleh masyarakat sebagai objek kebijakan, tetapi juga kemudahan, kecepatan dan kesinambungan dari akses terhadap lembaga finansial secara fungsi atau kondisional.

Berbagai hal yang dikemukakan oleh beberapa informan tersebut menunjukkan bahwa faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan perlu diperhitungkan. Sebab keluhan kelompok sasaran atas implementasi program merupakan masukan yang sangat berharga bagi pembenahan dalam

rangka memperbaiki implementasi kebijakan sektor kehutanan.

#### **g. Power, interest and strategies of actors involved**

Yang dimaksud adalah sejauh mana elit politik memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki untuk menjamin kepentingan mendapatkan sumberdaya bagi kelompoknya. Dalam suatu kebijakan perlu juga diperhitungkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan dan strategi yang digunakan oleh aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu kebijakan. Jika hal ini tidak diperhitungkan, besar kemungkinan kebijakan tidak berjalan sesuai rencana.

Power, interest and strategies of actors involved dapat merefleksikan variabel implementasi kebijakan sektor kehutanan memiliki posisi strategis dalam masyarakat sehingga sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan sektor kehutanan di kabupaten Pelalawan provinsi Riau dalam upaya lebih. *Power, interest and strategies of actors involved* dikembangkan menjadi meliputi: *power capabilities, Political will*, Dukungan masyarakat, dan tekanan interest group.

Beberapa aspek yang bisa diperankan oleh tokoh-tokoh masyarakat

dalam mendukung setiap program/kebijakan yang diarahkan pada masyarakat sangat banyak, antara lain meliputi:

- a. sebagai penyuluh adalah mengkomunikasikan, mengajak, dan menyampaikan gagasan tentang sesuatu.
- b. sebagai penggerak adalah mengkoordinasikan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat di lingkungannya agar masyarakat sadar bahwa kebijakan itu bermanfaat bagi masyarakat sendiri.
- c. sebagai motivator adalah mendorong masyarakat dengan cara persuasif atau membujuk agar masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan secara bersama-sama agar dengan kesadaran sendiri menjaga dan bertanggungjawab atas keberhasilan kebijakan atau program yang ada.
- d. sebagai fasilitator yaitu tokoh masyarakat sebagai orang yang akan membantu memberikan kemudahan-kemudahan pada sasaran
- e. sebagai katalisator adalah sebagai penghubung antara pemerintah

sebagai implementator kebijakan dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan.

- f. sebagai teladan bahwa gerak-gerik atau tindakan tokoh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, masyarakat, dan di lingkungannya akan dinilai oleh warganya dan akan jadi tuntunan atau panutan bagi masyarakat pengikutnya.

Tokoh masyarakat mempunyai kedekatan ikatan emosional dengan masyarakat, maka untuk mengakomodir berbagai gagasan-gagasan untuk kepentingan masyarakat, tokoh masyarakat diharapkan mampu menyambut kebijakan sektor kehutanan di Kabupaten Pelalawan. keberadaan tokoh masyarakat seperti yang ada di Kabupaten Pelalawan, cenderung masih terikat oleh nilai-nilai lama yakni tradisi dan ikatan kulturalnya. kekuatan tokoh memang masih bertumpu pada ikatan primordial, khususnya ikatan keluarga (family), kesukuan atau keagamaan. Oleh karena itu pengaruh ketokohan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai corong penyambung pesan-pesan ke kelompok sasaran. Ketokohan mereka

dapat dijadikan alat oleh pemerintah untuk mendukung implementasi kebijakan yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Peran para tokoh masyarakat dalam menggerakkan sektor dalam pelaksanaan kebijakan sektor kehutanan sangat diperlukan. Selain sebagai agen perubahan, para tokoh masyarakat juga diharapkan menjadi motivator dan teladan bagi masyarakat diklingkungannya. Tugas penting lainnya dari tokoh masyarakat adalah mengamankan kebijakan sektor kehutanan, agar berjalan sesuai dengan rencana.

Tokoh-tokoh baik tokoh agama, adat atau tokoh masyarakat lainnya, bentuk keterlibatan para tokoh ini masih minim dan bisa diasumsikan tidak ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di lokasi kegiatan implementasi kebijakan sektor kehutanan, para implementor dan rekanan pelaksana kegiatan hanya sekedar meminta izin pelaksanaan pekerjaan saja kepada para tokoh-tokoh yang terdapat di desa tempat pelaksanaan kebijakan sektor kehutanan. Keterlibatan para tokoh masyarakat di dalam kebijakan seharusnya merupakan aspek strategis yang menjadi dasar bagi

para implementor di pelaksanaan kebijakan. Para tokoh masyarakat ini mengetahui secara detail tentang karakteristik masyarakat, adat istiadat, lingkungan sosial atau tingkat kemampuan pendidikan masyarakat di tempat mereka. Hal ini akan memudahkan para implementor untuk menjalankan kebijakan di masyarakat lebih tepat sasaran.

Dengan memperhatikan berbagai aspek yang dapat diperankan oleh para tokoh masyarakat atau kelompok-kelompok berpengaruh tersebut akan turut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan sektor kehutanan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

#### **h. Institution and regime characteristics**

Dukungan dari pemerintahan yakni legislatif dan eksekutif sangat diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan sektor kehutanan, kebijakan sektor kehutanan serta alokasi anggaran yang diperuntukan dalam implementasi kebijakan tersebut. Didalam perjalanan kebijakan tersebut pihak legislatif melakukan fungsi pengawasan.

#### **i. Compliance and responsiveness**

Yang dimaksud adalah sejauh mana kepatuhan dan respon para

pelaksana dalam menanggapi kebijakan yang diimplementasikan kepada para penerima manfaat dalam upaya untuk memberi pelayanan yang memadai. Tanpa rasa tanggungjawab yang mendalam selama implementasi pejabat publik akan kehilangan informasi sebagai bahan evaluasi dan untuk menopang hal-hal yang kritis dalam mencapai sukses. Kepatuhan dan respon pelaksana tergantung pada kreativitas, kedekatan dengan stakeholder lainnya, adanya dukungan atau penolakan politisi.

Dalam konteks implementasi kebijakan desentralisasi, Rondinelli & Cheema (1983:30), memperkenalkan teori implementasi kebijakan yang orientasinya lebih menekankan kepada hubungan pengaruh faktor-faktor implementasi kebijakan desentralisasi terhadap lembaga daerah di bidang perencanaan dan administrasi pembangunan. Menurut konsep tersebut, ada dua pendekatan dalam proses implementasi kebijakan yang sering dikemukakan:

Pertama, *the compliance approach*, yaitu yang menganggap implementasi itu tidak lebih dari soal teknik, rutin. Ini adalah suatu proses pelaksanaan yang tidak mengandung

unsur-unsur politik yang perencanaannya sudah ditetapkan sebelumnya oleh para pimpinan politik (*political leaders*). Para administrator biasanya terdiri dari pegawai biasa yang tunduk kepada petunjuk dari para pemimpin politik tersebut. Kedua, *the political approach*. Pendekatan yang kedua ini sering disebut sebagai pendekatan politik yang mengandung “*administration as an integral part of the policy making process in which policies are refined, reformulated, or even abandoned in the process of implementing them.*”

Konsistensi Implementasi kebijakan sektor kehutanan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan merupakan salah satu komponen dalam pengukuran suatu implementasi telah tepat sasaran atau belum. Konsistensi ini dimulai dari tahap perencanaan sampai pengawasan dari sebuah implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan diketahui bahwa terdapat hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pelaksanaan kebijakan sektor kehutanan sehingga tidak dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan dalam peraturan.

Responsivitas para unsur pelaksana kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan yang menyangkut terhadap kebutuhan masyarakat yang tergabung didalam masyarakat peserta kebijakan sangat baik, hal ini disebabkan faktor komunikasi yang terjalin antar lini yang sudah baik. Faktor komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator yaitu unsur pelaksana kebijakan kepada para komunikan yaitu target group. Berhasil atau tidaknya pesan yang sampaikan, dapat dimaknai bila pesan tersebut dapat dimengerti oleh target group. Komunikasi sebagai sarana dari interaksi dari orang lain tentang pola pikir, merasakan dan bertindak, dimana hal tersebut akan sangat penting untuk menghasilkan tingkat partisipasi dari target group yang efektif. Komunikasi akan memberikan kontribusi besar pada kehidupan masyarakat yaitu memberikan dasar atau pondasi kepada tiap individu untuk lebih memahami maksud dan tujuan dari suatu kebijakan. Hal ini akan menciptakan suatu iklim yang kondusif di masyarakat.

Menurut Grindle (1980: 12), dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, pelaksana menghadapi dua persoalan yaitu pertama bagaimana mengatasi masalah untuk

mencapai tuntutan hasil akhir yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Bagaimana mendapat dukungan elit politik, ketaatan agen pelaksana, dukungan birokrat yang melaksanakan program, dukungan politikus di akar rumput, dan para penerima manfaat.

Mencermati hasil analisis secara statistik masing-masing dimensi dan dikaitkan dengan hasil wawancara sebagai counter information serta hasil pengamatan lapangan yang telah dibahas secara komprehensif di atas, menunjukkan bahwa variable laten implementasi kebijakan sektor kehutanan berpengaruh terhadap efektivitas pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pelalawan. Dari hasil analisis dan pembahasan bahwa dalam implementasi kebijakan diperlukan suatu sinergitas antar pelaksana dan target group sehingga tujuan kebijakan dapat dipenuhi.

Adanya koordinasi antar seluruh stakeholder yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam implementasi kebijakan diharapkan akan memaksimalkan pencapaian tujuan dari kebijakan sektor kehutanan di kabupaten Pelalawan. Pemerintah sebagai pihak pembuat kebijakan diharapkan mampu menyerap dan menyaring aspirasi dari

masyarakat sebagai sasaran atau target group, dan melibatkan pihak swasta sebagai pihak yang dapat membantu pelaksanaan baik dari sisi peralatan maupun dana. Keterlibatan pihak yang netral dari perguruan tinggi, atau lembaga penelitian untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan diharapkan mampu menimbulkan perimbangan dalam pemikiran pelaksanaan kebijakan.

### Daftar Pustaka

A. Djaja Saefullah, Modernisasi Perdesaan :Dampak Mobilitas Penduduk, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2008

Barnes JG.2003. Secrets of Customer Relationship Management. Alih Bahasa Andreas Winardi. Yogyakarta: Penerbit Andi

Creswell, John W. 2009. Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Penterjemah Achmad Fawaid

Ekawati, Sulistya 2013, Evaluasi Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Hutan Produksi (Evaluation of the Implementation of Decentralization Policy on Production Forest Management) Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan, 2013

Grindle, Marilee S (1980) Politics and Policy Implementation in the Third World. New Jersey. Princeton University Press.

Martono, Nanang, 2014, Sosiologi Perubahan Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mudjiahrahardjo, 2010, Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif dalam

*Rondinelli, Dennis A. dan G. Shabbir Cheema.1983. "Implementing Decentralization Policies : An Introduction." dalam G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (eds) Decentralization and Development. Policy Implementation in Developing Countries. California. Newdelhi dan London.:SAGE Publication.*

Siagian.S.P. Teori dan Praktek Pengambilan Keputusan. Jakarta :Haji Mas Agung.

Sumaryadi, I Nyoman, 2005, Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, CV. Citra Utama, Jakarta.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang Undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan

UU No. 41/1999 Tentang Kehutanan

UU No.19/2004 Tentang Perubahan UU Kehutanan